



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	35 ( <i>tiga puluh lima</i> )
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Phapros Tbk.
Hari, Tanggal	:	Senin, 5 Oktober 2020
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan mengenai Kondisi Aktual Perusahaan Dalam Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 2. Pembahasan profit Perusahaan ( <i>Capex</i> ) dan Operasional Perusahaan ( <i>Opex</i> ); 3. Lain-lain
Hadir	:	1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir, 3. Direktur Utama PT Kimia Farma, Tbk, Verdi Budidarmo, 4. Direktur Utama PT Indofarma, Tbk, Arief Pramuhanto, 5. Direktur Utama PT Phapros, Tbk, Hadi Kardoko, beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 1 Oktober 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid-19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi peranan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk dalam penanganan masalah Covid-19.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk tetap berperan aktif menekan penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka kematian di lingkungan kerja perkantoran, lingkungan kerja lapangan dan lingkungan sekitar perkantoran.
3. Komisi VI DPR RI mendorong PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk melakukan efisiensi operasional usaha, menjaga likuiditas serta mencermati iklim usaha untuk mencari peluang-peluang penambahan pendapatan dan untuk menjaga serta meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Komisi VI DPR RI mendukung PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk meningkatkan kemandirian penyediaan obat-obatan Covid-19 dengan mengembangkan produksi bahan baku obat dalam negeri dan memaksimalkan sumber daya dalam negeri sehingga tidak mengalami ketergantungan pada bahan baku impor.
5. Komisi VI DPR RI mendukung PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk agar melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam kebijakan:
  - a. Percepatan realisasi anggaran Pemerintah untuk program Penanganan Covid-19;
  - b. Pemberian insentif pajak untuk produk strategis, khususnya untuk pajak impor bahan baku obat, bahan kemas, obat, alat kesehatan dan produk farmasi lainnya;
  - c. Pemberian subsidi dari Pemerintah ke industri farmasi apabila terjadi lonjakan harga Bahan Baku Obat dan Alat Kesehatan akibat dari Covid-19, termasuk fluktuasi kurs dan suku bunga;
  - d. Pengurangan/pelarangan import produk jadi obat atau alat kesehatan yang telah dapat di produksi dalam negeri dalam jumlah yang cukup;
  - e. Pengutamaan pembelian dengan anggaran pemerintah untuk produk yang memiliki nilai Total Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi selama harga yang ditawarkan masih wajar;
  - f. Pemberian fasilitas khusus bagi produk obat/alat kesehatan dengan TKDN tinggi, agar memacu kemandirian pengembangan bahan baku obat;
  - g. Penghapusan status pemungut (WAPU) untuk BUMN agar tidak terjadi klaim restitusi yang membebani *cash flow*; dan
  - h. Pemberian *law inforcement/punishment* bagi pemenang/penyedia produk obat/alat kesehatan dalam tender Pemerintah bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kontrak dengan alasan apapun untuk mencegah rusaknya harga obat/alat kesehatan serta terganggunya *supply* obat/alat kesehatan ke masyarakat.

6. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk menyampaikan *Business Plan*, Proyeksi Pengembangan Bisnis dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun ke depan dan visi jangka panjang serta memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

**Catatan:**

Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BUMN Farmasi, Senin, 05 Oktober 2020 akan ditindaklanjuti sebagai bahan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksanaan Tim Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A.  
A-103**